

BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF

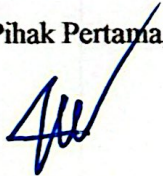
Pada hari Jumat, tanggal Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Dinas Perhubungan Provinsi Riau, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INDRAWANSYAH, S.E., M.Si
Jabatan : Pimpinan Unit Pengolah Bidang Angkutan Jalan
Selaku Pihak Pertama/Pimpinan Unit Pengolah/Unit Kerja/Unit Kearsipan II

Nama : MOHD TAFIANTO, S.E.
Jabatan : Ketua Unit Kearsipan

Menerangkan bahwa pihak Pertama telah melakukan pemindahan arsip inaktif Surat Keputusan Tahun 2020 sejumlah 4 Dokumen di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Riau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, berikut daftar arsip inaktif yang dipindahkan terlampir.

Pihak Pertama,



INDRAWANSYAH, S.E., M.Si
NIP. 19820307 200604 1 007

Pihak Kedua,



MOHD TAFIANTO, S.E.
NIP. 19650213 199503 1 001

DAFTAR BERKAS INAKTIF**DAFTAR UNIT PENGELOLA/UNIT KERJA: BIDANG ANGKUTAN (KBD.2)**

NO	NOMOR ARSIP/ BERKAS	KODE KLARIFIKASI	URAIAN INFORMASI BERKAS	KURUN WAKTU	JUMLAH	KETERANGAN
1.	KPTS	188	Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi (Online) Kepada PT. Rahayu Jasa Pratama	2020	1 Berkas	1
2.	KPTS	188	Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi (Online) Kepada Koperasi Mitra Penyelenggara Angkutan Sewa (Kompas)	2020	1 Berkas	1

3.	KPTS	188	Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kepada PT. Ranah Makmur Kampar	2020	1 Berkas	1
4.	KPTS	188	Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Kepada PT. Mentari Seribu Kubah	2020	1 Berkas	1

Pekanbaru JULI 2022

BIDANG ANGKUTAN JALAN



INDRAWANSYAH, SE., M.Si

NIP.19820307 200604 1 007

LAPORAN
BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF



Disusun Oleh :

GUNAWAN, A,Md

Arsiparis Pelaksana Lanjutan

NIP 19890318 201102 1 001

DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI RIAU

2022

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menurut UU 43 Tahun 2009 arsip inaktif adalah “Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun / jarang digunakan” dan pada Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2012 Arsip inaktif dikategorikan sebagai Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

Umumnya arsip inaktif adalah arsip yang sudah ada dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga dalam hal ini informasi yang ada didalamnya sudah jarang digunakan atau mungkin informasi yang terkandung didalamnya sudah tidak berlaku lagi.

Akan tetapi justru pengelolaan arsip inaktif merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan secara berkala, guna menunjang sistem pengelolaan arsip yang baik ada efektif, arsip inaktif yang tercampur dengan arsip aktif akan menimbulkan berbagai masalah antara lain : a) Overload ruang (ruang yang seharusnya bisa digunakan untuk arsip aktif yang baru) b) Memperlambat waktu pencarian arsip aktif (apabila penyimpanannya tercampur dengan arsip aktif) c) Penambahan indeks pencarian d) Menimbulkan bau yang tidak sedap apabila arsip tersebut sudah rusak dan terlalu lama e) dan lain sebagainya.

2. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- b. Perka ANRI nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelaksana Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis

3. Maksud dan Tujuan

Dikarenakan masa retrensi atau frekuensi penggunaannya yang sudah menurun maka arsip tersebut perlu dipindahkan.

4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Riau khususnya Bidang Angkutan Jalan.

B. PELAKSANAAN

1. Waktu dan Tempat

Pemindahan Arsip Inaktif dilakukan pada Bulan Juli dari Ruang Arsip di Bidang Angkutan Jalan.

2. Pelaksana

Dilaksanakan oleh arsiparis dinas perhubungan provinsi riau

3. Metode

Serah terima berkas yang dilengkapi dengan berita acara dan foto pemindahan arsip.

C. HASIL PELAKSANA

1. Jenis arsip yang dipindahkan

Adapun jenis arsip yang dipindahkan adalah arsip Surat Keputusan Bulanan Tahun 2020

2. Jumlah arsip yang dipindahkan

Adapun jumlah arsip yang dipindahkan adalah 4 Berkas.

D. HAMBATAN DAN PEMECAHAN MASALAH

Tidak ada hambatan yang berarti dalam pemindahan arsip inaktif, hanya saja space penyimpanan di depo arsip hampir penuh dikarenakan masih tahapan pemusnahan arsip untuk memaksimalkan storage atau rak yang tersedia.

E. PENUTUP

Demikian Laporan ini dibuat untuk dipertanggung jawabkan sebagai Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis

Lampiran : Foto Copy Berita Acara Pemindahan Arsip inaktif

Diketahui Oleh,
Atasan Langsung



AMRIDAR, S.Sos
NIP.19670403 199203 2 006

Dibuat Oleh,
Arsiparis Pelaksana Lanjutan



GUNAWAN, S.T.
NIP 19890318 201102 1 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PERHUBUNGAN



Jl. Jend. Sudirman 474 Pekanbaru Telp. (0761) 34245 -33992 Fax. (0761) 21850
Email : dinasperhubungan@riau.go.id Website : www.dishub.riau.go.id Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU NOMOR : KPTS. 090/DPHB-KBD.2/ 2773

Tentang

PELAKSANAAN KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN SEWA KHUSUS BERBASIS APLIKASI (ONLINE) KEPADA PT. RAHAYU JASA PRATAMA

- Membaca : 1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : KPTS.503/DPMPSTP/KOMITMEN/IZIN-UPAO/28 tanggal 26 Juni 2020, tentang Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang (Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi (Online);
2. Surat Permohonan Pimpinan PT. Rahayu Jasa Pratama Nomor : 010/RJP/VII/2020 tanggal 17 November 2020 perihal Permohonan Penambahan Unit Kendaraan dan Kartu Pengawasan.
3. Pertimbangan dari :
- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Nomor : 551.21/DPHB-KBD.I/984 tanggal 28 November 2019 perihal Persetujuan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi (Online);
- Menimbang : Bahwa permohonan yang bersangkutan adalah untuk realisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi (Online);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Mencabut SK Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau tentang Keputusan Pelaksanaan Izin Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi (Online) PT. Rahayu Jasa Pratama Nomor : KPTS. 090/DPHB-KBD.I/1076 tanggal 31 Desember 2019.
- Kedua : Melaksanakan operasional pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang telah ditetapkan dalam wilayah Provinsi Riau (Perkotaan) sebanyak **Sebanyak 15 (Lima Belas)** Unit Kendaraan dengan menggunakan aplikasi Gojek
- Masa Berlaku Izin : 13 Desember 2019 s/d 12 Desember 2024
- Kedua : Pelayanan angkutan penumpang umum tersebut diatas dilayani oleh kendaraan – kendaraan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan kepadanya diberikan Kartu Pengawasan.
- Ketiga : Semua ketentuan yang tercantum dibalik Keputusan ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pemegang Izin.
- Keempat : Keputusan ini dapat dirubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : P E K A N B A R U
PADA TANGGAL : 24 November 2020

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI RIAU

4 Kepala Bidang Angkutan Jalan

INDRAWANSYAH, SE., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19820307 200604 1 007

DAFTAR KENDARAAN PT. RAHAYU JASA PRATAMA

NO.	NO. TNKB	MERK KENDARAAN	TAHUN	KAPASITAS		APLIKASI LAYANAN
				ORANG	BARANG (Kg)	
1.	BM 1007 NQ	S. KARIMUN	2017	4	30	GOJEK
2.	BM 1991 QD	S. KARIMUN	2017	4	30	GOJEK
3.	BM 1357 NO	TYT. ETIOS	2014	4	30	GOJEK
4.	BM 1254 VS	TYT. CALYA	2018	6	50	GOJEK
5.	BM 1117 ND	DAIHT. SIGRA	2017	6	50	GOJEK
6.	BM 1948 ZG	DAIHT. SIGRA	2017	6	50	GOJEK
7.	BM 1224 ZI	DAIHT. SIGRA	2018	6	50	GOJEK
8.	BM 1387 VY	WULING	2017	6	50	GOJEK
9.	BM 1636 OT	S. KARIMUN	2019	4	30	GOJEK
10.	BM 1045 JV	T. AVANZA	2012	6	50	GOJEK
11.	BM 1315 VS	T. CALYA	2018	6	50	GOJEK
12.	BM 1076 VQ	DAIHT. AYLA	2018	4	30	GOJEK
13.	BM 1830 ZB	DAIHT. AYLA	2014	4	30	GOJEK
14.	BM 1891 CM	TYT. RUSH	2015	6	50	GOJEK
15.	BM 1793 MJ	TYT. AGYA	2015	6	50	GOJEK

**A.n KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI RIAU**

y Kepala Bidang Angkutan Jalan



INDRAWANSYAH, SE., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19820307 200604 1 007



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PERHUBUNGAN



Jl. Jend. Sudirman 474 Pekanbaru Telp. (0761) 34245 -33992 Fax. (0761) 21850
Email : dinasperhubungan@riau.go.id Website : www.dishub.riau.go.id Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU NOMOR : KPTS. 090/DPHB-KBD.2/2755

Tentang

PELAKSANAAN KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG ANGKUTAN SEWA KHUSUS BERBASIS APLIKASI (ONLINE) KEPADA KOPERASI MITRA PENYELENGGARA ANGKUTAN SEWA (KOMPASS)

- Membaca : 1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : KPTS.503/DPMPTSP/KOMITMEN/IZIN-UPAO/35 tanggal 30 September 2020, tentang Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang (Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi (Online);
2. Surat Permohonan Pimpinan Koperasi Mitra Penyelenggara Angkutan Sewa (Kompass) Nomor : KPS/SP/2020/DIS/03.05 tanggal 4 Maret 2020 perihal Permohonan SK Pelaksanaan dan Kartu Pengawasan.
3. Pertimbangan dari :
- a. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Nomor : 551.21/DPHB-KBD.I/274 tanggal 31 Januari 2020 perihal Persetujuan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi (Online);
- Menimbang : Bahwa permohonan yang bersangkutan adalah untuk realisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi (Online);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Mencabut SK Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau tentang Keputusan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus an Koperasi Mitra Penyelenggara Angkutan Sewa (Kompass) Nomor : KPTS.090/DPHB-KBD.2/377 tanggal 12 Maret 2020.
- Kedua : Melaksanakan operasional pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang telah ditetapkan dalam wilayah Provinsi Riau (Perkotaan) sebanyak **Sebanyak 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan.**
Masa Berlaku Izin : **7 Februari 2020 s/d 6 Februari 2020**
- Ketiga : Pelayanan angkutan penumpang umum tersebut diatas dilayani oleh kendaraan – kendaraan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan kepadanya diberikan Kartu Pengawasan.
- Keempat : Semua ketentuan yang tercantum dibalik Keputusan ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pemegang Izin.
- Kelima : Keputusan ini dapat dirubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 27 November 2020

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI RIAU
Kepala Bidang Angkutan Jalan

INDRAWANSYAH, SE., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19820307 200604 1 007

Daftar lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU
NOMOR : KPTS. 090/DPHB-KBD.2/2755
TANGGAL : 27 November 2020

DAFTAR KENDARAAN KOPERASI MITRA PENYELENGGARA ANGKUTAN SEWA (KOMPASS)

NO.	NO. TNKB	MERK KENDARAAN	TAHUN	KAPASITAS		APLIKASI LAYANAN
				ORANG	BARANG (Kg)	
1.	BM 1511 JT	TYT. AGYA	2016	4	30	GOJEK
2.	BM 1526 TN	S. KARIMUN	2017	4	30	GOJEK
3.	BM 1634 OZ	TYT. AGYA	2019	4	30	GOJEK
4.	BM 1909 NB	NIS. MARCH	2016	4	30	GOJEK
5.	BM 1287 VH	H. BRIO	2018	4	30	GOJEK
6.	BM 1074 TM	TYT. AVANZA	2015	6	50	GOJEK
7.	BM 1174 KI	DAIHT. SIGRA	2018	6	50	GOJEK
8.	BM 1200 NJ	H. BRIO	2017	4	30	GOJEK
9.	BM 1103 VR	DAIHT. XENIA	2018	6	50	GOJEK
10.	BM 1300 QV	TYT. AGYA	2017	4	30	GOJEK
11.	BM 1524 TF	DATSUN GO	2015	4	30	GOJEK
12.	BM 1596 VP	DAIHT. SIGRA	2018	6	50	GOJEK
13.	BM 1627 ZH	DAIHT. AYLA	2017	4	30	GOJEK
14.	BM 1662 JT	S. KARIMUN	2017	4	30	GOJEK
15.	BM 1692 JQ	DAIHT. XENIA	2016	6	50	GOJEK
16.	BM 1468 QZ	H. MOBILIO	2016	6	50	GOJEK

**A.n KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI RIAU**
Kepala Bidang Angkutan Jalan

INDRAWANSYAH, SE., M.Si
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19820307 200604 1 007



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PERHUBUNGAN



Jl. Jend. Sudirman 474 Pekanbaru Telp. (0761) 34245-33992 Fax. (0761) 21850
Email : dinasperhubungan@riau.go.id Website : www.dishub.riau.go.id Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU NOMOR : KPTS.090/DPHB-KBD.2/ 2020

Tentang

PELAKSANAAN KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KEPADA PT. RANAH MAKMUR KAMPAR

- Membaca :**
1. Surat permohonan pimpinan PT. Ranah Makmur Kampar Nomor : 02/RM/II/2020 tanggal 10 November 2020 perihal Permohonan Penggantian Unit Kendaraan dan Kartu Pengawasan (KP).
 2. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor : KPTS. 503/BP2T/IZIN-HUB/26 tanggal 13 November 2017 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
 3. Pertimbangan dari :
 - a. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Nomor : 551.21/DPHB-KBD.I/1141 tanggal 26 Oktober 2017 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
- Menimbang :** Bahwa permohonan yang bersangkutan adalah untuk realisasi perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) pada trayek sesuai dengan pertimbangan teknis yang telah diberikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah Provinsi Riau

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama :** Mencabut SK Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau tentang Keputusan Pelaksanaan Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) PT. Ranah Makmur Kampar Nomor : KPTS.090/DPHB-KBD.2/167 tanggal 20 Maret 2020.
- Kedua :** Melaksanakan pelayanan angkutan penumpang umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) pada trayek yang telah ditetapkan yakni :
1. **PSR. PANGARAIAN – UJUNG BATU – BANGKINANG – PEKANBARU – TLK. KUANTAN – RENGAT – TEMBILAHAN. PP**
Sebanyak 16 (enam belas) unit.
 2. **BANGKINANG – PEKANBARU – PKL. KERINCI – RENGAT – TEMBILAHAN. PP**
Sebanyak 9 (sembilan) unit.

Masa Berlaku Izin : 13 November 2017 s/d 12 November 2022

- Ketiga :** Trayek – trayek tersebut diatas dilayani oleh kendaraan – kendaraan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan kepadanya diberikan Kartu Pengawasan.
- Keempat :** Semua ketentuan yang tercantum dibalik Keputusan ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pemegang Izin.
- Kelima :** Keputusan ini dapat dirubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : P E K A N B A R U
PADA TANGGAL : 7 Desember 2020

A.n KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI RIAU

y Kepala Bidang Angkutan Jalan

DAFTAR KENDARAAN PT. RANAH MAKMUR KAMPAR

No	No. TNKB	No. Uji	Trayek	Daya Angkut		Kode Trayek	Jarak (km)
				Org	Brg		
1.	BM 7002 MU	SAK. 1876	PSR. PANGARAIAN – UJUNG BATU – BANGKINANG – PEKANBARU – TLK. KUANTAN – RENGAT – TEMBILAHAN. PP Sda	12	110	14.05.02.27	440
2.	BM 7716 TU	PPN 2534		12	110	14.05.02.27	440
3.	BM 7987 FU	BKN 1592 A		12	110	14.05.02.27	440
4.	BM 7025 MU	PPN 1561		12	110	14.05.02.27	440
5.	BM 7733 AU	PBR 43915		12	110	14.05.02.27	440
6.	BM 7940 AU	PBR 39026		12	110	14.05.02.27	440
7.	BM 7106 SU	SAK 1605		12	110	14.05.02.27	440
8.	BM 7801 TU	BKN 1902		12	110	14.05.02.27	440
9.	BM 7052 CU	PKR 1610		12	110	14.05.02.27	440
10.	BM 7554 FU	BKN 4628		12	110	14.05.02.27	440
11.	BM 7142 TU	PBR 48217		12	110	14.05.02.27	440
12.	BM 7050 MU	TBL 496		12	110	14.05.02.27	440
13.	BM 7118 GU	TBL 425		12	110	14.05.02.27	440
14.	BM 7224 FU	BKN 1547 A		12	110	14.05.02.27	440
15.	BM 7974 MU	BKN 3340 A		12	110	14.05.02.27	440
16.	BM 7612 FU	BKN 1982 A		12	110	14.05.02.27	440
17.	BM 7416 DU	BLS 6146	BANGKINANG – PEKANBARU – PKL. KERINCI – RENGAT – TEMBILAHAN. PP Sda	12	110	14.05.02.27	393
18.	BM 7461 TU	PBR 52247		12	110	14.05.02.27	393
19.	BM 7317 TU	PBR 52166		12	110	14.05.02.27	393
20.	BM 7867 BU	PBR 46548		12	110	14.05.02.27	393
21.	BM 7976 BU	RGT 660 A		12	110	14.05.02.27	393
22.	BM 7989 AU	PBR 40994		12	110	14.05.02.27	393
23.	BM 7328 TU	PBR 52329		12	110	14.05.02.27	393

24.	BM 7497 TU	PBR 51729	Sda	12	110	14.05.02.27	393
25.	BM 7902 MU	PPN 0486	Sda	12	110	14.05.02.27	393

**An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI RIAU**
Kepala Bidang Angkutan Jalan

INDRAWANSYAH, SE., M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19820307 200604 1 007



DINAS PERHUBUNGAN



Jl. Jend. Sudirman 474 Pekanbaru Telp. (0761) 34245-33992 Fax. (0761) 21850
Email : dinasperhubungan@riau.go.id Website : www.dishub.riau.go.id Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

NOMOR : KPTS. 090/DPHB-KBD.2/ 2017

Tentang

PELAKSANAAN KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI (AJDP) KEPADA PT. MENTARI SERIBU KUBAH

- Membaca : 1. Surat permohonan pimpinan PT. Mentari Seribu Kubah nomor : 09/MSK-BA/2020 tanggal 27 Juli 2020 Perihal SK Pelaksanaan dan Kartu Pengawasan (KP).
2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : KPTS.503/DPMPTSP/KOMITMEN/IZIN-UPAO/24 tanggal 9 April 2020, perihal Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Orang (AJDP).
3. Pertimbangan dari :
a. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau Nomor : 551.21/DPHB-KBD.I/560 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pertimbangan Teknis Izin Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP).
- Menimbang : Bahwa permohonan yang bersangkutan adalah untuk realisasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah Provinsi Riau..

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Melaksanakan pelayanan angkutan penumpang umum Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) pada trayek yang telah ditetapkan yakni :
1. **BAGAN SIAPI API – PEKANBARU. PP** Sebanyak 2 (dua) unit kendaraan.
- Masa Berlaku Izin : 9 April 2020 s/d 8 April 2025
- Kedua : Trayek tersebut diatas dilayani oleh kendaraan – kendaraan seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan kepadanya diberikan Kartu Pengawasan.
- Ketiga : Semua ketentuan yang tercantum dibalik Keputusan ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pemegang Izin.
- Keempat : Keputusan ini dapat dirubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : P E K A N B A R U
PADA TANGGAL : 01 Desember 2020

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI RIAU

y Kepala Bidang Angkutan Jalan

INDRAWANSYAH, SE., M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19820307 200604 1 007

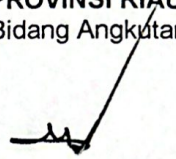
Daftar lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU
NOMOR : KPTS. 090/DPHB-KBD.2/ 3017
TANGGAL : 17 Desember 2020

DAFTAR KENDARAAN PT. MENTARI SERIBU KUBAH

NO.	NO. TNKB	NO. UJI KENDARAAN	TRAYEK	MERK KENDARAAN	TAHUN	KAPASITAS		JARAK (KM)
						ORG	BRG (Kg)	
1.	BM 1635 PU	BAG. 9040	BAGAN SIAPI API – PEKANBARU. PP SDA	T. INNOVA	2020	7	60	245
2.	BM 1021 PU	BAG. 9158		T. INNOVA	2015	7	60	245

**An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI RIAU**

y Kepala Bidang Angkutan Jalan


INDRAWANSYAH, SE., M.Si
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19820307 200604 1 007